

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Sukirno, 2006).

Menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bila mana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. (Suryono,2000). Menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat.

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau umlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan,2001).

Koefisien gini (Gini Ratio) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Agregat Koefisien gini adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol digunakan sebagai ukuran ketidaserataan distribusi pendapatan atau ketidakmerataan distribusi kekayaan (BPS Kota Padang, 2010). Berikut data Gini Ratio Kota Padang Tabel 1.1

Tabel 1.1
Gini Ratio Kota Padang Tahun 1993-2022

Tahun	Gini Ratio	Tahun	Gini Ratio
1993	0.250	2008	0.290
1994	0.215	2009	0.300
1995	0.240	2010	0.330
1996	0.273	2011	0.304
1997	0.220	2012	0.328
1998	0.270	2013	0.365
1999	0.245	2014	0.331
2000	0.226	2015	0.350
2001	0.218	2016	0.350
2002	0.250	2017	0.338
2003	0.240	2018	0.344
2004	0.260	2019	0.312
2005	0.255	2020	0.312
2006	0.260	2021	0.343
2007	0.280	2022	0.354

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat Gini Ratio kota Padang setiap tahun nya mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 1993 gini rasio nya sebesar 0,250, pada tahun 1994 gini rasio nya turun menjadi sebesar 0,215 dan pada tahun 1995 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,240 hingga tahun 1996 sebesar 0,273. Dan terus mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2010 Gini Ratio nya sebesar 0,330. Tahun 2011 gini rasionya turun menjadi sebesar 0,304 dan pada tahun 2012 gini rasionya naik menjadi sebesar 0,328 hingga tahun 2013 gini rasionya sebesar 0,365. Dan mengalami fluktuasi dari tahun 2014 dengan gini ratio sebesar 0,331 hingga tahun 2022 gini rasionya naik menjadi 0,354.

Menurut Simon Kuznets (1995), meningkatnya ketimpangan pendapatan disebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak tahapan awal pembangunan, lalu pada tahapan berikutnya akan meratakan distribusi

pendapatan. Pertumbuhan ekonomi sering kali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi Negara yang sedang berkembang. Pada tahap awal perkembangan ekonomi dicirikan oleh peranan sektor pertanian yang dominan.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan cara mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Sedangkan menurut Lincoln Arsyad, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *gross domestic product* (GDP)/ *gross national product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yaitu, kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk serta perbaikan pendidikan), penanaman modal dan teknologi. Salah satu alat ukur kualitas penduduk yaitu indeks

pembangunan manusia (IPM). IPM memiliki peranan penting dalam proses pembangunan perekonomian modern, sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan secara optimal. Kualitas penduduk yang baik akan mampu berinovasi untuk mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain itu, pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi. Hal ini akan mempermudah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau dibayar dibawah standar. Hal ini lah berdampak pada semakin tingginya angka ketimpangan. Salah satu faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di Sub-Saharan Afrika adalah peningkatan populasi penduduk (Fulgsang, 2013).

Pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya akan menjadikan kompetisi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan menjadi sangat ketat. Menurut penelitian yang dilakukan Fulgsang (2013), pertumbuhan jumlah penduduk akan meningkatkan angka ketimpangan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja. Banyaknya penawaran tenaga kerja menjadikan tenaga kerja kelas bawah akan dibayar upah yang sedikit atau di bawah standar upah minimum.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup

masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan daerah/wilayah.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 1993-2022 (Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1993	686.100	2008	849.423
1994	703.900	2009	866.642
1995	719.344	2010	836.671
1996	739.500	2011	850.306
1997	757.600	2012	863.401
1998	775.600	2013	876.670
1999	793.800	2014	889.561
2000	713.242	2015	902.413
2001	726.926	2016	914.968
2002	743.221	2017	927.011
2003	763.867	2018	939.112
2004	780.953	2019	950.871
2005	798.005	2020	909.040
2006	815.078	2021	913.448
2007	832.208	2022	919.145

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumbar, 2023

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi

semakin jauh. Berdasarkan data dari pusat statistik Sumatera Barat pertumbuhan penduduk dari tahun 1993 sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 1993 sebanyak 686.100 ribu jiwa dan naik pada tahun 1994 menjadi 705.900 ribu jiwa. Jumlah penduduk semakin bertambah dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 1995 naik menjadi 719.344 ribu jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 919.145 ribu jiwa.

Tabel 1.3

Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 1993-2022 (Persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
1993	3.50	2008	6.21
1994	3.86	2009	3.91
1995	4.18	2010	5.47
1996	4.37	2011	6.23
1997	4.59	2012	6.16
1998	4.76	2013	6.66
1999	4.92	2014	6.46
2000	5.15	2015	6.41
2001	5.50	2016	6.17
2002	5.30	2017	6.23
2003	5.55	2018	6.06
2004	5.89	2019	5.65
2005	5.29	2020	-1,86
2006	5.12	2021	3.66
2007	6.14	2022	4.33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2023

Berdasarkan data dari pusat statistik kota Padang pertumbuhan ekonomi pada tahun 1993-2022 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 1993 sebesar 3.50% tahun 1994 naik menjadi 3.86% dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2008 yaitu sebesar 6.21%. Pada tahun 2009 turun menjadi 3.91% dan naik tahun 2010 menjadi 5.47%. Tahun 2011 naik sebesar 6.23% hingga tahun 2018 naik menjadi

6.06%. Tahun 2019 turun menjadi 5.65 % dan menurun drastis pada tahun 2020 menjadi -1.86%. Pada tahun 2021 naik menjadi, 3.66% dan terus naik hingga tahun 2022 menjadi 4.33%.

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Tahun 1993-2022
(Poin)

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)
1993	50.17	2008	77.20
1994	57.20	2009	77.43
1995	60.15	2010	77.81
1996	74.10	2011	78.15
1997	67.86	2012	78.55
1998	69.70	2013	78.82
1999	70.40	2014	79.83
2000	71.50	2015	80.36
2001	72.30	2016	81.06
2002	73.20	2017	81.58
2003	74.10	2018	82.25
2004	75.80	2019	82.68
2005	76.30	2020	82.82
2006	76.50	2021	82.90
2007	76.70	2022	83.29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang , 2023

Selain itu berdasarkan data dari pusat statistik kota Padang Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 1993 sampai tahun 2022 mengalami kemajuan dimana pada tahun 1993 indeks pembangunan manusia di Kota Padang hanya 50.17 poin tahun 1994 meningkat menjadi 57.20 poin dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 83.29 poin.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “*ANALISIS JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN*

*EKONOMI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KOTA PADANG”.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap distribusi pendapatan di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap distribusi pendapatan di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan diatas maka dapat disimpulkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan tentang distribusi pendapatan.
2. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi mengenai distribusi pendapatan.
3. Bagi pembaca, untuk menambah wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.